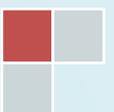


# PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI TAHUN. 2017



**BALAI BESAR VETERINER WATES, YOGYAKARTA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN**



## KATA PENGANTAR

Penanggulangan gangguan reproduksi pada Sapi dan Kerbau betina produktif merupakan salah satu kegiatan dalam Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB), dengan penanggulangan gangguan reproduksi dapat meningkatkan jumlah akseptor Inseminasi Buatan dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah kebuntingan dan kelahiran pedet untuk menambah populasi dari hasil inseminasi buatan.

Gangguan reproduksi menyebabkan betina produktif tidak dapat bunting sehingga dapat menghilangkan produktifitas dan peluang menghasilkan kelahiran pedet untuk penambahan populasi.

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian pada Tahun Anggaran 2017 akan melaksanakan program UPSUS SIWAB melalui kegiatan Penanggulangan gangguan Reproduksi, Pelayanan Inseminasi Buatan, Pemenuhan Semen beku dan N<sub>2</sub> cair, Pengendalian Betina Produktif, dan Pemenuhan hijauan Pakan Ternak.

Sebagai bagian dari tindak lanjut penetapan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut serta untuk kelancaran pelaksanaan di lapangan diperlukan suatu acuan teknis yang lebih rinci bagi para pelaksana lapangan dan pemangku kepentingan supaya program dan kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal serta selalu memenuhi persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Petunjuk Teknis Penanggulangan Gangguan Reproduksi ini sekaligus sebagai Petunjuk Pelaksanaan serta acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi khususnya di Wilayah Kerja Balai Besar Veteriner Wates (Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta).

Perbaikan dan penyempurnaan akan dilakukan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan/ kesalahan/ kekurangan dalam Petunjuk Teknis ini.

**Yogyakarta, Pebruari 2017**

**Kepala Balai Besar Veteriner Wates,**

  
**drh. Bagoes Pbermadjaja, MSc**  
**NIP. 19630820 199003 1 003**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Tujuan kegiatan</b> .....	2
<b>C. Sasaran kegiatan</b> .....	2
<b>D. Keluaran</b> .....	2
BAB II. PERSIAPAN KEGIATAN PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI .....	4
BAB III. DISTRIBUSI LOGISTIK .....	6
BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI .....	8
<b>A. Penjaringan Ternak betina produktif</b> .....	8
<b>B. Pemberian Kartu Ternak dan Pemasangan <i>Necktag</i></b> .....	9
<b>C. Pelaksanaan Penanggulangan Gangguan Reproduksi</b> .....	9
<b>D. Gangguan Reproduksi, Penyebab dan Penanganannya</b> .....	11
<b>E. Pengobatan I Penanggulangan Gangguan Reproduksi</b> .....	14
<b>F. Pengobatan II dan pemantauan I dari hasil penanggulangan gangrep</b> .....	15
<b>G. Pemantauan II hasil penanggulangan gangrep</b> .....	15
<b>H. Penerbitan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR)</b> .....	15
<b>I. Pelaporan Pelaksanaan Penanggulangan Gangguan Reproduksi</b> .....	16
<b>J. Pelaporan ke iSIKHNAS</b> .....	16
<b>K. Laporan akhir kegiatan</b> .....	17
BAB V. PENGANGGARAN DAN ADMINISTRASI.....	18
<b>A. Anggaran pembiayaan</b> .....	18
<b>B. Pengadaan barang dan jasa</b> .....	18
<b>C. Perjalanan Dinas</b> .....	18
BAB VI. PENGENDALIAN, PENGAWASAN SERTA INDIKATOR KEBERHASILAN .....	19
A. Lingkungan Pengendalian.....	19
B. Penilaian Risiko.....	19
C. Penanganan Risiko .....	19
BAB VII. MONITORING, SUPERVISI, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI.....	21
<b>A. Monitoring dan Supervisi</b> .....	21
<b>B. Evaluasi</b> .....	21
<b>C. Pelaporan</b> .....	21

BAB VIII. MANAJEMEN OPERASIONAL.....	22
<b>A. Manajemen SDM Pelaksana Kegiatan.....</b>	<b>22</b>
<b>B. Tim Pendamping.....</b>	<b>22</b>
<b>C. Tim Teknis Kabupaten/Kota .....</b>	<b>23</b>
<b>D. Manajemen Keuangan.....</b>	<b>24</b>
IX. PENUTUP .....	27
LAMPIRAN .....	28
Lampiran 1. Target Akseptor Gangrep Propinsi Jawa Timur.....	28
Lampiran 2. Target Akseptor Gangrep Propinsi Jawa Tengah .....	29
Lampiran 3. Target Akseptor Gangrep Daerah Istimewa Yogyakarta .....	30
Lampiran 4. Surat Keterangan Status Reproduksi.....	31
Lampiran 5. Form 1 Pengobatan I Penanggulangan Gangrep .....	32
Lampiran 6. Form 2 Pengobatan II dan Pemantauan I Penanggulangan Gangrep.....	33
Lampiran 7. Form 3 Pemantauan II Penanggulangan Gangrep .....	34
Lampiran 8. Rekapitulasi Form 1 .....	35
Lampiran 8. Rekapitulasi Form 2 .....	36
Lampiran 9. Rekapitulasi Form 3 .....	37

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penanggulangan gangguan reproduksi pada Sapi dan Kerbau betina produktif merupakan salah satu kegiatan dalam Upaya Khusus Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting (UPSUS SIWAB), dengan penanggulangan gangguan reproduksi dapat meningkatkan akseptor Inseminasi Buatan dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah kebuntingan dan kelahiran pedet untuk menambah populasi yang dihasilkan dari inseminasi buatan.

Gangguan reproduksi menyebabkan betina produktif tidak dapat bunting sehingga dapat menghilangkan produktifitas dan peluang menghasilkan kelahiran pedet untuk penambahan populasi.

Program UPSUS SIWAB melalui kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi, Pelayanan Inseminasi Buatan, Pemenuhan Semen beku dan N2 cair, Pengendalian Betina Produktif, dan Pemenuhan hijauan Pakan Ternak. Penanggulangan gangguan reproduksi dilakukan terhadap Sapi betina produktif yang mengalami gangguan fisiologis atau penyakit pada alat reproduksinya sehingga tidak dapat bunting meskipun telah dilakukan IB atau kawin alami. Dengan Penanggulangan gangguan reproduksi diharapkan sapi/ kerbau yang mengalami gangguan reproduksi dapat disembuhkan sehingga dapat meningkatkan jumlah akseptor untuk inseminasi buatan atau kawin alami yang akan menghasilkan kebuntingan dan kelahiran pedet untuk menambah populasi.

Balai Besar Veteriner Wates mendapat tugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pelayanan Penanggulangan Gangguan Reproduksi di Wilayah kerja yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi BBVet Wates TA 2017 ini juga sebagai Petunjuk Pelaksanaan yang disusun sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif di lapangan khususnya di Wilayah Kerja BBVet Wates sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Penanggulangan Gangguan Reproduksi yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanggulangan Gangguan Reproduksi ini diharapkan pelaksanaan kegiatan akan berjalan dengan sebaik-baiknya secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal sesuai yang direncanakan serta memenuhi persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku.

## **B. Tujuan kegiatan**

1. Penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/ kerbau betina produktif di wilayah kerja BBVet Wates yang mengalami gangguan reproduksi sehingga siap dilakukan Inseminasi Buatan.
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas sapi/ kerbau betina produktif sebagai akseptor IB sehingga dapat membantu mengoptimalkan pelaksanaan inseminasi buatan yang akan menghasilkan kebuntingan dan kelahiran Pedet untuk menambah populasi dan produktifitas ternak.

## **C. Sasaran kegiatan**

Sapi betina produktif milik masyarakat di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak bisa bunting karena mengalami gangguan reproduksi untuk dilakukan penanggulangan gangguan reproduksi serta penyembuhan agar siap menjadi akseptor IB atau kawin alam untuk dapat menghasilkan kebuntingan dan kelahiran pedet.

## **D. Keluaran**

Terlaksananya pemeriksaan, diagnosa dan pengobatan gangguan reproduksi pada sapi/ kerbau betina produktif yang tidak bunting karena mengalami gangguan reproduksi dengan target total sebanyak 167.676 akseptor terdiri dari Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 7.056 akseptor, Provinsi Jawa Tengah 47.010 akseptor dan Provinsi Jawa Timur 114.510 akseptor sapi. Pelayanan penanggulangan gangguan reproduksi dilaksanakan di lapangan dengan kunjungan sebanyak 3 kali.

Kunjungan pertama untuk melakukan seleksi sekaligus pengobatan terhadap ternak yang mengalami gangguan reproduksi, kunjungan kedua melakukan pemantauan dan melakukan pengobatan ulang terhadap ternak yang belum sembuh dari gangrep dan kunjungan ketiga untuk memantau hasil inseminasi yang telah dilakukan.

## **BAB II. PERSIAPAN KEGIATAN PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI**

Untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi diperlukan peralatan dan obat-obatan serta persiapan pelaksanaan di lapangan. Persiapan yang diperlukan di BBVet Wates meliputi :

- A. Pembuatan Surat Keputusan Pengelola Kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi.
- B. Pembuatan petunjuk teknis penanggulangan gangguan reproduksi yang telah dilengkapi dengan target akseptor setiap kabupaten yang mendapatkan alokasi kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi.
- C. Pengadaan logistik berupa obat-obatan, hormon dan bahan serta alat pendukung pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi.
- D. Pengiriman logistik ke seluruh kabupaten yang mendapatkan alokasi kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi.
- E. Rapat-rapat persiapan pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi dengan kabupaten dan propinsi penerima alokasi kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi.
- F. Refresher petugas gangguan reproduksi.

Persiapan yang diperlukan Propinsi adalah :

Tim Pelaksana Administratif tingkat provinsi yang dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan perlu mempersiapkan :

- A. Menginventarisasi data petugas kesehatan hewan kompeten di bidang reproduksi ternak tingkat Provinsi
- B. Membuat SK tim pelaksana yang ditandatangani oleh Kepala Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan propinsi
- C. Menetapkan wilayah sasaran kegiatan lingkup provinsi
- D. Melakukan Sosialisasi dan Koordinasi Kegiatan tingkat provinsi dan kabupaten/ kota
- E. Melakukan penyegaran/ training tim pelaksana penanganan gangguan reproduksi

Adapun persiapan yang diperlukan Kabupaten adalah :

- A. Menginventarisasi data petugas kesehatan hewan yang kompeten di bidang reproduksi ternak tingkat kabupaten/ kota.
- B. Menetapkan wilayah sasaran kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi lingkup kabupaten /kota.
- C. Menyiapkan Tim pelaksana kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi.

- D. Membuat SK tim pelaksana kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi yang ditandatangani oleh kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan kabupaten/ kota.
- E. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan kepada Tim, jika perlu kepada ke kelompok ternak dan masyarakat peternakan.

### BAB III. DISTRIBUSI LOGISTIK

Pengadaan logistik berupa alat-alat diagnosa, obat, vitamin dan sebagainya yang diperlukan dalam penanggulangan gangguan reproduksi dilaksanakan oleh Balai Besar Veteriner Wates melalui proses pengadaan sesuai dengan peraturan yang ada, kemudian akan didistribusikan ke masing-masing kabupaten yang mendapatkan akseptor penanggulangan gangguan reproduksi.

Jumlah logistik yang didistribusikan disesuaikan dengan jumlah akseptor di masing-masing Kabupaten. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten menunjuk petugas penerima barang logistik untuk keperluan penanggulangan gangrep dari BBVet Wates.

Surat serah terima barang ditanda tangani oleh petugas penerima barang yang telah ditunjuk, setelah barang diterima dilakukan pengecekan kondisi logistik dan jumlah logistik sesuai dengan daftar. Berita acara serah terima barang diserahkan kembali ke Balai Besar Veteriner Wates dan Kabupaten penerima logistik menerima copy/tembusannya. Penyimpanan sementara logistik sebelum digunakan disiapkan tempat di dinas yang membidangi fungsi peternakan/ Kesehatan Hewan Kabupaten pelaksana kegiatan.

Distribusi logistik dari Kabupaten ke lapangan tempat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Kabupaten dengan menyesuaikan situasi dan kondisi setempat. Jenis logistik utama berupa obat-obatan untuk penanggulangan penyakit gangguan reproduksi di wilayah kerja BBVet Wates sebagaimana daftar tersebut di bawah ini.

Tabel 1. Daftar rencana logistik yang akan dikirim ke Kabupaten penerima alokasi kegiatan penanggulangan gangrep

NO	NAMA BARANG	KEMASAN	SATUAN
1	Flukicide Bolus	42 bolus/pot	pot/ botol
2	Vetadryl	100 ml/btl	botol
3	Cofavit 500	100 ml/btl	botol
4	Biodin	100 ml/btl	botol
5	Hematopan B12	50 ml/ btl	botol
6	Lagantor F-1	1 kg dalam zak 25 kg	zak
7	Juramate	Botol 20 ml	botol
8	Fertagyl	Vial 10 ml	botol
9	Pen & Strep LA	Botol 100 ml	botol
10	Metricure	Syringe	botol
11	Gusanex Spray	Kaleng 13 OZ	kaleng
12	Povidone iodine	Botol	botol
13	Aquadest sterile	Botol	botol
14	Neck Tag	25 buah/kantong	buah

15	Pengikat Necktag	100 buah/pack	pack
16	Tang pemotong	buah	buah
17	Kartu/Stiker ternak	Lembar	lembar
18	Glove Reproduksi	100 lembar/pack	pack
19	Gun IB	1 unit/ pack	pack
20	Plastic Sheath	buah	buah
21	Marker Neck Tag	12 buah/boks	boks
22	Spidol permanen	12 buah/boks	boks
23	Sprit disposible 10 ml	100 buah/boks	boks
24	Sprit disposible 50 ml	20 buah/boks	boks
25	Jarum Disposible 18 G	100 buah/boks	boks
26	Masker	100 buah/boks	boks
27	Glove karet	100 buah/boks	box
28	Kapas	ball	ball
29	Alkohol	1 liter/ btl	botol
30	Sepatu boot	pasang	pasang
31	Tas obat	buah	buah
32	Wearpak	buah	buah
33	Topi lapangan	buah	buah

## **BAB IV. PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI**

Pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada masing-masing daerah disesuaikan dengan target akseptor yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Gangrep dan Inseminasi Buatan diupayakan dilakukan bersamaan dalam satu tim. Ternak betina yang reproduksinya normal akan dijadikan sebagai akseptor IB, sedangkan ternak yang mengalami gangguan reproduksi menjadi akseptor Penanggulangan Gangrep dan dilakukan penanggulangan sesuai dengan diagnosis dan prosedur penanganannya, dengan demikian kegiatan IB, PKB, ATR dan Penanggulangan Gangrep diupayakan agar dilaksanakan secara simultan oleh satu tim, dengan demikian perlakuan terhadap ternak menyesuaikan dengan kondisi ternak yang ditemui, jika ternak mengalami gangrep maka dilakukan penanggulangan gangrep, jika menemui ternak yang siap di IB maka dilakukan IB oleh tim yang sama.

### **A. Penjaringan Ternak betina produktif**

1. Pemeriksaan dan pemilihan Sapi/ Kerbau betina produktif dari populasi/kelompok dengan kriteria Nilai Kondisi Tubuh (NKT) atau *Body Conditioning Score* (BCS)  $\geq 2$  dan dinyatakan memenuhi kriteria berdasarkan anamnesa.
2. Pemeriksaan kondisi umum, eksterior tubuh, gejala klinis dan pemeriksaan melalui eksplorasi rektal untuk menentukan status reproduksi maka sapi dapat didiagnosa sebagai berikut : sapi/kerbau bunting, sapi/kerbau tidak bunting dengan organ reproduksi normal dan sapi mengalami gangguan reproduksi dan sapi masih dara.
3. Sapi/Kerbau bunting, tidak dilakukan tindakan/ penanganan medis diberikan *advis* untuk meningkatkan pemberian nutrisi. Sapi/ kerbau tidak bunting dengan organ reproduksi normal diberikan *advis* untuk sebagai akseptor IB.
4. Ternak yang tidak bunting dan status reproduksinya tidak normal ditetapkan sebagai target penanganan gangguan reproduksi.
5. Kriteria ternak yang akan dilakukan tindakan penanganan gangguan reproduksi adalah ternak dengan kondisi sebagai berikut :
  - a. Dikawinkan atau di IB minimal 2 kali dan tidak bunting (Kawin berulang)
  - b. Ternak mengalami Keguguran/ Abortus/ melahirkan prematur/ anak mati.
  - c. Ternak mengalami prolapsus uteri
  - d. Ternak mengalami birahi tenang/ silent heat/ siklus estrusnya ubnormal
  - e. Estrus tidak teramati setelah 50 hari melahirkan

- f. Ternak mengalami retensi placenta
- g. Ada *discharge* abnormal yang keluar dari vulva

Target akseptor penanggulangan gangguan reproduksi di masing – masing kabupaten sebagaimana terlampir.

#### **B. Pemberian Kartu Ternak dan Pemasangan *Necktag***

Dari hasil penjarangan akan didapatkan ternak yang mengalami gangguan reproduksi. Pemilik ternak yang ternaknya mengalami gangguan reproduksi akan diberikan kartu ternak, identitas dan tindakan terhadap ternak yang mengalami gangguan reproduksi ditulis dalam kartu ternak tersebut.

Ternak yang mengalami gangguan reproduksi diberikan *Necktag* yang bertuliskan kode ternak/ nomor identifikasi ternak, yang berfungsi sebagai identitas ternak yang mengalami gangguan reproduksi sehingga memudahkan dalam melakukan pemantauan kesembuhan dari hasil penanggulangan gangguan reproduksi.

Jika menemui ternak yang sudah ada nomor identitasnya, maka yang digunakan adalah identitas ternak yang telah lebih dulu ada dan identitas ternak pada form 1, form 2 dan form 3 menggunakan identitas yang sudah lebih dulu ada, sedangkan necktag dapat ditulisi kembali di sisi yang masih kosong.

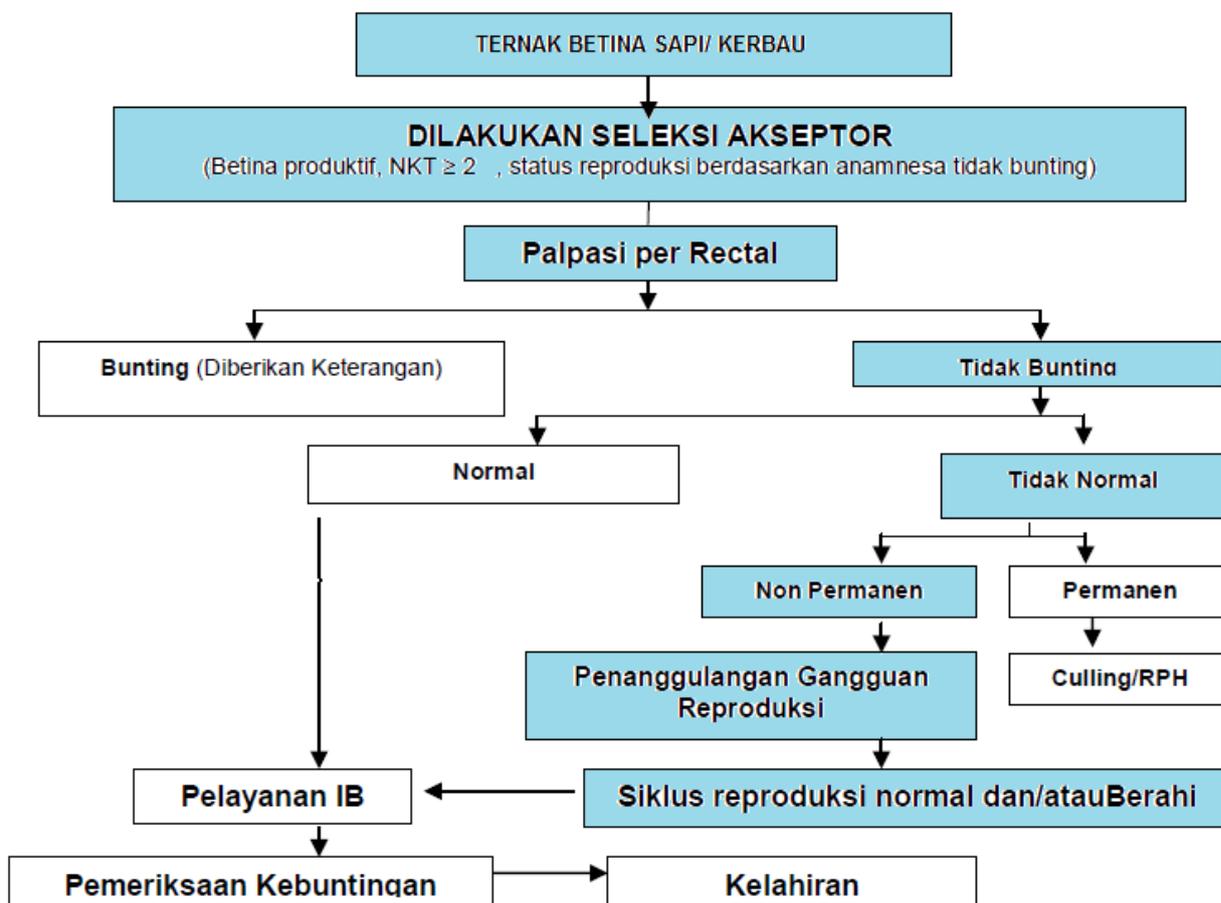
#### **C. Pelaksanaan Penanggulangan Gangguan Reproduksi**

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan diagnosa, untuk ternak betina produktif yang tidak bunting dan telah ditetapkan status reproduksinya tidak normal atau mengalami gangguan reproduksi diberikan pelayanan penanggulangan gangguan reproduksi atau pengobatan sesuai dengan jenis dan penyebab gangguan reproduksinya.
2. Prosedur pemeriksaan dan diagnosa dimulai dari pemeriksaan kondisi umum eksterior tubuh ternak diikuti dengan pemeriksaan organ reproduksi eksternal dan kemudian dilakukan palpasi rectal untuk mengetahui status kebuntingan, kondisi ovarium dan uterus.
3. Penanggulangan gangguan reproduksi harus diberikan vitamin ADE, premiks, dan obat cacing, obat-obatan lainnya dan tindakan medis lainnya menyesuaikan dengan hasil diagnosa, misalnya tindakan medis pembilasan uterus atau bedah ringan sesuai dengan gangguan reproduksinya dan ketentuan serta persyaratan medis.
4. Jenis gangguan reproduksi meliputi hipofungsi ovari, corpus luteum persisten, endometritis, pyometra, ovarial cyst, silent heat, vulvitis, vaginitis, mumifikasi fetus,

retensi placenta ataupun penyakit lain yang berakibat pada gangguan reproduksi baik secara langsung maupun tidak langsung.

5. Pemeriksaan dan diagnosa status reproduksi dan gangguan reproduksi serta pengobatan dan tindakan medis dilakukan oleh dokter hewan atau asisten teknis reproduksi dibawah pengawasan dokter hewan.
6. Sapi betina dengan kelainan genetik reproduksi seperti *freemartin*, *agenesis ovaria*, *atrofi ovaria*, *hipoplasia ovaria* dan kelainan genetik lainnya dinyatakan sebagai betina majir. Sapi dengan kasus tersebut tidak dimasukkan dalam daftar akseptor kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi dan dapat dipertimbangkan untuk diculling.
7. Identitas peternak, identitas ternak yang mengalami gangguan reproduksi ditulis dalam Form 1 sebagaimana terlampir.
8. Hasil diagnosa dan pengobatan tiap ternak ditulis ke dalam form 1 sebagaimana terlampir.

Gambar 1. Skema tahapan pelaksanaan penanggulangan gangguan reproduksi



#### D. Gangguan Reproduksi, Penyebab dan Penanganannya

Jenis- jenis gangguan reproduksi meliputi *hipofungsi ovarii*, *corpus luteum persisten*, *endometritis*, *pyometra*, *ovarial cyst*, *silent heat*, *vulvitis*, *vaginitis*, *mumifikasi fetus*, *retensi placenta* ataupun penyakit lain yang berakibat pada gangguan reproduksi baik secara langsung maupun tidak langsung, pengobatan gangguan reproduksi disesuaikan dengan jenis gangguan reproduksi, akan tetapi setiap ternak diberikan 3 treatment yakni obat cacing, vitamin ADE dan premiks, dan dapat diberikan tambahan treatment lain menyesuaikan dengan jenis penyakitnya.

Petunjuk mengenai jenis dan gangguan reproduksi sebagai acuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 : Gangguan Reproduksi, dan Penanggulangannya adalah sebagai berikut

NO	NAMA GANGGUAN REPRODUKSI	PENYEBAB	PENANGANAN/PENGOBATAN	PREDIKSI WAKTU PENANGANAN - SP SEMBUH / SIAP IB
1	<b>Endometritis</b>	Bakteri/ mikroorganisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Povidon Iodin maksimal 2% intra uterina</li> <li>- 500 ribu - 1 juta IU Penicillin dan 500 mgr - 1 gr Streptomycin intra uterine</li> </ul>	1-2 minggu situasional
2	<b>Piometra</b>	Bakteri /mikroorganisme	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penisillin G 1 Juta IU dan Dehydrostreptomycin 1000 mgr dilarutkan dalam 40 ml aquadest 40 ml intra uterin.</li> <li>- Yodium 1-2 % 20 - 60 ml intra uterna</li> <li>- PGF2a 25 mg IM.</li> </ul>	2- 4 minggu situasional
AnEstrus (Post Partus : 30-76 hr pada sapi perah, 40-48 hr pd sapi potong)				
4	<b>Hipofungsi ovarium</b>	Tidak ada Corpus Luteum, terjadi gangguan poros hypothalamus-hypofisa-ovarium, sehingga sekresi GnRh menurun, diikuti menurunnya FSH dan LH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki pakan</li> <li>- Pemenuhan mineral reproduksi al: Phospor, Kalsium, Selenium, Mn dll.</li> <li>- Pemberian vitamin A dan E (Vit ADE injeksi). ADE tidak disintesa oleh tubuh, sehingga harus tersedia di dalam pakan. Jika pakan kurang, maka harus diberikan dari luar tubuh/injeksi.</li> <li>- Vit A rendah, hormon gonadotropin ikut turun. Vit D rendah menyebabkan birahi tidak muncul. Jika bunting sering terjadi retensi plasenta.</li> <li>- Penyuntikan GnRh 100 - 250 mcg IM</li> </ul>	5 hari-1 bulan Situasional
5	<b>Corpus Luteum Persisten (CLP)</b>	- Kadar Progesteron yang selalu tinggi di dalam darah, memberi umpan balik negatif pada hypofisa anterior, yg diikuti menurunnya hormone GnRh shg tdk ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyingkiran/enukleasi /pemijatan CL (butuh keahlian)</li> <li>- PGf2α 20-25 mg IM.</li> <li>- Kombinasi PGF2α dan Povidon iodine 1-2% sebanyak 20 -60 ml Intra Uterina.</li> </ul>	3 hari

		perkembangan folikel yang baru. - Adanya gangguan di uterus berupa tingginya populasi kuman (endometritis)		
6	<b>Atropi Ovarium</b>	Ovarium dg ukuran sangat kecil, permukaan licin. Terjadi dalam waktu yang lama tanpa perbaikan pakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki pakan</li> <li>- Multivitamin dan Vit Reproduksi (ADE)</li> <li>- Kontrol penyakit dan parasit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-6 bulan</li> <li>- afkir</li> </ul>
7	<b>Hypoplasia ovarium</b>	Ovarium kecil tanpa folikel dan korpus luteum, bersifat genetik. Tubuh cenderung gemuk dan mengkilat menyerupai hewan jantan yang dibeiri.	Cerderung steril. Dikeluarkan dari kelompok .	Out/afkir
8	<b>Kista ovarium</b>	Terganggunya pelepasan hormon LH dari hipofisa anterior	Penyuntikan GnRh 100 - 250 mcg IM atau penyuntikan PGF2a 20 - 25 mg IM	22 hari dari penyuntikan GnRh
9	<b>Silent Heat (Birahi Tenang)</b>	Rendahnya sekresi hormon estrogen oleh folikel matang di ovarium	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estradiol dosis rendah (3-5 mg IM).</li> <li>2. PGF2a 25 mg IM</li> </ol>	Tidak tentu Segera kawinkan pada sapi yg sdh menunjukkan birahi.
10	<b>Vulvitis</b>	Infeksi oleh mikroorganisme dan pengaruh mekanik saat partus (Distokia, Penanganan prolaps vagina atau uterus yang tidak baik, akibat fetotomi fetus dll)	<p>Pemakaian salep antibiotika, Spray antibiotika dan antiparasit, Penyuntikan antibiotik broad spectrum</p> <p><b>Penicillin G Procaine</b> : 10.000-20.000 Unit /Kg IM tiap 12 -24 jam</p> <p><b>Benzatin Penicillin G</b> : 10.000-20.000 Unit/Kg IM/SQ tiap 48 jam</p> <p><b>Oxytetrasiklin</b> : 5 - 10 mg/Kg BB Atau 20 mg/Kg BB tiap 48 - 72 jam jika menggunakan LA</p>	Situasional
11	<b>Vaginitis</b>	Infeksi oleh mikroorganisme dan pengaruh	Irigasi saluran vagina dengan antiseptik (povidon iodine dll) Antibiotik broad spectrum	Situasional

		mekanik saat partus (Distokia, fetotomi fetus dll)	<b>Penicillin G Procaine</b> : 10.000-20.000 Unit /Kg IM tiap 12 -24 jam <b>Benzatin Penicillin G</b> : 10.000-20.000 Unit/Kg IM/SQ tiap 48 jam <b>Oxytetrasielin</b> : 5 - 10 mg/Kg BB Atau 20 mg/Kg BB tiap 48 - 72 jam jika menggunakan LA	
12	<b>Retensi Plasenta (lebih dari 12 jam dari saat partus)</b>	Gangguan mekanis, atoni uteri, dan gangguan pelepasan sekundinae dari karunkula induknya	Pengeluaran plasenta dari alat kelamin se cepatnya, penyuntikan Oksitosin 100 IU IM, Injeksi Penstrep dgn perbandingan 1 juta IU dan 1 gr dihidrostreptomisin. Atau penyuntikan PENICILLIN G PROCAINE : 10.000-20.000 Unit /Kg IM tiap 12 -24 jam Benzatin Penicillin G : 10.000-20.000 Unit/Kg IM/SQ tiap 48 jam OXYTETRASIKLIN : 5 - 10 mg/Kg BB Atau 20 mg/Kg BB tiap 48 - 72 jam jika menggunakan LA	Situasional
13	<b>Involusi uterus terlambat.</b> Masa involusi normal 42 hari pd induk sapi yg baru beranak dan 50 hari pd induk sapi yang sdh beberapa kali melahirkan	Distokia, retensi plasenta, Prolaps uterus, endometritis dan kelahiran kembar.	Antibiotik broad spectrum PENICILLIN G PROCAINE : 10.000-20.000 Unit /Kg IM tiap 12 -24 jam Benzatin Penicillin G : 10.000-20.000 Unit/Kg IM/SQ tiap 48 jam OXYTETRASIKLIN : 5 - 10 mg/Kg BB Atau 20 mg/Kg BB tiap 48 - 72 jam jika menggunakan LA	Situasional

#### E. Pengobatan I Penanggulangan Gangguan Reproduksi

Ternak yang telah terseleksi mengalami gangguan reproduksi , dilakukan Pengobatan I, setiap ternak yang mengalami gangguan reproduksi wajib diobati dengan minimal 3 obat yakni : obat cacing/ Flukicide bolus, Premiks/ Lagantor F-1 dan vitamin ADE/ Covafavit 5000, jika perlu diberikan tambahan obat lain yang sesuai dengan hasil diagnosa.

Hasil Pengobatan I, dicatat ke dalam Form -1, kemudian direkap dimasukkan ke dalam Rekap Form 1, form 1 dan rekap form 1 sebagaimana terlampir.

Form 1 dan rekapnya diserahkan ke Dinas untuk diiput ke iSIKHNAS oleh Data Recorder dan diproses untuk Pertanggungjawaban ke BBVet Wates oleh penanggungjawab SPJ untuk mendapatkan penggantian biaya operasional Penanggulangan gangrep

#### **F. Pengobatan II dan pemantauan I dari hasil penanggulangan gangrep**

Petugas/ tim yang telah melakukan pengobatan selanjutnya melakukan pemantauan ternak yang telah ditangani, pemantauan diperlukan dalam rangka mengetahui hasil penanggulangan/ pengobatan gangguan reproduksi. Jika ternaknya belum sembuh hendaknya dilakukan pengobatan lagi, setelah dua kali penanganan tidak menunjukkan kesembuhan maka ternak tersebut dikeluarkan dari program penanggulangan gangguan reproduksi. Kesembuhan dinyatakan dengan siklus birahi kembali normal dengan ditandai adanya folikel normal yang aktif, ternak yang sembuh dari gangguan reproduksi diharapkan menjadi akseptor inseminasi buatan, yang setelah birahi dilakukan inseminasi buatan.

Pemantauan hasil penanggulangan gangguan reproduksi dimasukkan dalam form 2 dan direkap hasilnya ke rekap form 2. hasil form 2 diinput ke dalam iSIKHNAS dan dispjkan ke BBVet Wates untuk mendapatkan biaya operasional penanggulangan gangguan reproduksi Form 2 dan rekap form 2 pemantauan penanggulangan gangguan reproduksi sebagaimana terlampir.

#### **G. Pemantauan II hasil penanggulangan gangrep**

Pada menjelang akhir tahun anggaran pada wilayah tertentu dengan jumlah sekitar 60% dari akseptor penanggulangan gangrep akan dilakukan pemantaun kedua, tujuan dari pemantauan kedua adalah untuk memonitor ternak yang telah dilakukan penanggulangan gangguan reproduksi dan telah dilakukan Inseminasi Buatan. Hasil akhir dari pemantauan kedua adalah mengetahui kesembuhan dari pengobatan gangguan reproduksi kedua dan kebuntingannya/ kelahiran jika telah dilakukan inseminasi buatan.

Hasil pemantauan kedua dimasukkan ke dalam form 3 dan direkap ke rekap form 3. Hasil form 3 diinput ke dalam iSIKHNAS dan dispjkan ke BBVet Wates untuk mendapatkan biaya operasional penanggulangan gangguan reproduksi.

Form 3 dan rekap form 3 pemantauan penanggulangan gangguan reproduksi sebagaimana terlampir.

#### **H. Penerbitan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR)**

Setiap ternak yang diperiksa dan dinyatakan mengalami gangguan reproduksi dibuatkan SKSR, kemudian setelah melakukan pemantauan pertama maupun kedua juga dibuatkan SKSR apabila mengalami perubahan status reproduksi. SKSR dibuat rangkap 4 yakni untuk UPT Veteriner, Dinas yang membidangi fungsi Peternakan Kabupaten, Dokter Hewan Puskesmas dan untuk peternak. SKSR ditanda tangani oleh dokter hewan dalam tim operasional lapangan.

Hasil penetapan status reproduksi sapi dan kerbau diterbitkan SKSR yang menerangkan kondisi sapi sebagai berikut:

- a. bunting
- b. tidak bunting dengan status reproduksi normal, ditetapkan sebagai akseptor IB
- c. tidak bunting dengan status mengalami gangrep non permanen, ditetapkan sebagai akseptor penanggulangan gangrep;
- d. tidak bunting dengan status mengalami gangrep permanen, diberikan SKSR keterangan tidak produktif.

Pengaturan penomoran SKSR diserahkan ke Kabupaten masing-masing. SKSR tembusan ke UPT Veteriner diikut sertakan ke dalam SPJ ke BBVet Wates

#### **I. Pelaporan Pelaksanaan Penanggulangan Gangguan Reproduksi**

Pelaporan terhadap pelaksanaan penanggulangan gangguan reproduksi dan pemantauan hasil penanggulangan gangguan reproduksi yang telah dimasukkan/ dicatat ke dalam form 1 dan form 2 dan form 3 ditandatangani oleh pemilik ternak, salah satu petugas lapangan, kepala wilayah setempat dan koordinator penanggulangan gangrep kabupaten atau pejabat yang membidangi fungsi peternakan atau kesehatan hewan.

Form 1, form 2 dan form 3 yang asli dilengkapi dengan berkas persyaratan lainnya dikirimkan ke Balai Besar Veteriner Wates untuk proses SPJ untuk mendapatkan pembayaran penanggulangan gangguan reproduksi dan pemantauan hasil penanggulangan gangguan reproduksi. Ketua Tim atau petugas yang melaksanakan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi sebaiknya memiliki arsip form tersebut.

#### **J. Pelaporan ke iSIKHNAS**

Hasil Pengobatan I, Pengobatan II/ Pemantauan I dan Pemantauan II harus input oleh Data Recorder ke iSIKHNAS, selama iSIKHNAS berjalan dengan baik dan tidak mengalami gangguan, untuk input data ke iSIKHNAS menggunakan format DP untuk mendaftarkan pemiliknya, DH untuk mendaftarkan Hewannya, jika ternak tersebut belum terdaftar di iSIKHNAS, UI untuk melaporkan hasil diagnosa penyakit gangguan Reproduksi secara Individual, OBI untuk melaporkan pengobatannya, PK untuk perkembangan kasus yakni melaporkan hasil pengobatan, sembuh atau tidaknya penyakit tersebut. Pada pemantauan kedua dilakukan pemantauan kebutingan dengan pemeriksaan eksplorasi rektal, untuk itu dilaporkan hasilnya ke isikhnas dengan PKB dan jika telah ada kelahiran dilaporkan ke isikhnas dengan LH. Pelaporan ke iSIKHNAS diupayakan dilaporkan secara harian.

## **K. Laporan akhir kegiatan**

Koordinator Penanggulangan Gangguan Reproduksi Kabupaten harus membuat laporan akhir kegiatan lengkap dari hasil kegiatan penanggulangan Gangguan Reproduksi yang merangkum semua kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi yang dibiayai melalui Satker Balai Besar Veteriner Wates, Yogyakarta. Laporan akhir kegiatan hendaknya dilengkapi tambahan foto-foto perwakilan yang representatif, laporan dibuat hardcopy dan softcopy.

## **BAB V. PENGANGGARAN DAN ADMINISTRASI**

### **A. Anggaran pembiayaan**

Semua pembiayaan yang diperlukan dalam penanggulangan gangguan reproduksi dibebankan pada anggaran APBN BBVet Wates tahun 2017 yang tercantum dalam DIPA Satker Balai Besar Veteriner Wates, Yogyakarta Tahun Anggaran 2017, No: SP DIPA 018-06.2.239544/2017, tanggal 7 Desember 2016.

### **B. Pengadaan barang dan jasa**

Pengadaan barang dan jasa mengikuti Perpres No 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Untuk memperlancar kegiatan pengadaan barang jasa dibentuk kelompok kerja pengadaan barang dan jasa, panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan yang bertugas untuk melakukan kegiatan proses pengadaan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku

### **C. Perjalanan Dinas**

Perjalanan Dinas untuk personil baik dari BBVet Wates dan Kabupaten yang bertugas di lapangan dalam rangka kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Balai Besar Veteriner Wates dan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum. Tim Penanggulangan Gangguan Reproduksi Kabupaten, Kecamatan dan pendamping desa bisa mendapatkan biaya perjalanan dinas, perjalanan dinas kabupaten diperlukan untuk melakukan persiapan-persiapan dan monitoring lapangan, peninjauan lokasi, monitoring dan evaluasi ke lapangan, maupun dropping logistik ke lapangan, sedangkan tim kecamatan dapat menggunakan perjalanan dinas untuk kontak awal dengan perangkat desa/ lokasi yang akan menjadi obyek penanggulangan gangguan reproduksi, untuk melakukan seleksi lokasi awal, sedangkan perjalanan pendamping desa diberikan kepada petugas desa/ kecamatan yang mendampingi kegiatan penanggulangan gangrep di lapangan juga dapat digunakan untuk kegiatan lain yang dianggap perlu untuk kepentingan kelancaran kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi.

## **BAB VI. PENGENDALIAN, PENGAWASAN SERTA INDIKATOR KEBERHASILAN**

### **A. Lingkungan Pengendalian**

Untuk mencapai sasaran operasional kegiatan dengan baik, efektif dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi BBVet Wates melibatkan Satuan Pengendalian Internal (SPI) Balai Besar Veteriner Wates.

### **B. Penilaian Risiko**

Setiap kegiatan memiliki risiko adanya hambatan dan rintangan yang harus diantisipasi dan diatasi. Hambatan dan tantangan yang besar dan tidak segera diatasi dengan baik dapat berpotensi menyebabkan kegagalan. Penanggulangan penyakit gangguan reproduksi merupakan kegiatan di BBVet Wates dan merupakan kegiatan yang bersifat *crash program* yang melibatkan banyak pihak baik pemerintah, peternak memerlukan komunikasi dan koordinasi yang sangat intens. Titik kritis yang kemungkinan muncul sebagai hambatan kegiatan ini adalah:

1. Kurangnya data dan informasi terkait populasi dan jumlah serta sebaran ternak yang mengalami gangguan reproduksi.
2. Ketidaktepatan diagnosa pemeriksaan status reproduksi.
3. Timbulnya masalah pembayaran operasional petugas lapangan.
4. Menurunnya efektifitas akibat kelebihan beban kerja baik petugas BBVet Wates maupun petugas lapangan.
5. Kurangnya jumlah petugas teknis lapangan baik di BBVet maupun petugas teknis reproduksi di Lapangan.
6. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal palang yang telah ditetapkan.
7. Keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan.
8. Input hasil penanggulangan gangguan reproduksi ke iSIKHNAS mengalami kendala.
9. Pencapaian target akseptor gangrep di suatu kabupaten tidak dapat tercapai

### **C. Penanganan Risiko**

Untuk mengantisipasi agar kegiatan pengendalian gangguan reproduksi di BBVet Wates berjalan dengan baik dan menyelesaikan titik kritis yang muncul selama kegiatan berlangsung dilakukan langkah penanganan sebagai berikut:

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Penanggulangan Penyakit Gangguan Reproduksi yang sedini mungkin.

2. Untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dibuat jadwal pengadaan barang seawal mungkin setelah DIPA disetujui
3. Dilakukan survey barang dan jasa dengan baik dan mencari pembanding yang sesuai.
4. Dilakukan sosialisasi baik secara langsung melalui rakor dan pelatihan teknis maupun sosialisasi tidak langsung melalui kegiatan surveilans yang dilakukan oleh BBVet.
5. Dilakukan seleksi petugas yang memenuhi kemampuan dan bersertifikat, dilakukan bimbingan teknis dan *refresher* bagi petugas lapangan sebelum mulai kegiatan.
6. Dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak agar pembayaran bisa dilaksanakan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
7. Memberikan motivasi dan melibatkan semua lini dalam kegiatan penanggulangan gangrep.
8. Mengatur jadwal rutin kegiatan surveilans, berkoordinasi dengan berbagai pihak agar kebutuhan tenaga dapat tercukupi.
9. Mendeteksi seawal mungkin permasalahan yang timbul dan berpotensi menghambat kegiatan sehingga kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu.
10. Melakukan sosialisasi ke Kabupaten jika diperlukan.
11. Melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja masing-masing kabupaten, jika ada kabupaten yang tidak dapat mencapai target, maka dialihkan ke Kabupaten lainnya.

Titik kritis yang berpotensi menghambat keberhasilan menjadi catatan yang selalu diperhatikan di setiap tahap kegiatan sehingga dapat segera dikendalikan. Keberhasilan pengendalian hanya dapat diukur melalui indikator keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.

## **BAB VII. MONITORING, SUPERVISI, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI**

### **A. Monitoring dan Supervisi**

Monitoring dan Supervisi dilakukan oleh petugas Balai Besar Veteriner Wates, kegiatan monitoring dan supervisi meliputi administratif dan keuangan, logistik, validasi data, teknis pelaksanaan kegiatan penanggulangan reproduksi di lapangan. Petugas yang melakukan monitoring dan supervisi harus membuat laporan hasil secara tertulis sebagai bahan evaluasi dan koordinasi di Balai Besar Veteriner.

### **B. Evaluasi**

Evaluasi kegiatan dilakukan di Balai Besar Veteriner Wates. Bahan evaluasi yang digunakan berupa hasil laporan petugas yang menangani gangguan reproduksi, dan hasil download dari iSIKHNAS. Hasil evaluasi lapangan yang berupa laporan target dan capaian kegiatan dan dari iSIKHNAS, serta kendala atau permasalahan yang terjadi di lapangan yang dilaporkan oleh koordinator masing-masing Provinsi. Evaluasi juga meliputi kecukupan bahan, tenaga lapangan, peralatan habis pakai, kendala transportasi dan masalah lainnya.

Hasil evaluasi dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan kegiatan baik administratif maupun teknis di lapangan.

### **C. Pelaporan**

Dinas yang membidangi fungsi peternakan kabupaten yang mendapatkan alokasi pengendalian gangguan reproduksi diwajibkan untuk membuat laporan tahunan, jumlah akseptor yang berhasil diobati harus sesuai dengan yang telah diinput ke iSIKHNAS. Pelaporan secara periodik ke BBVet Wates yang dilengkapi dengan bahan pertanggung jawaban (SPJ) rampung. SPJ yang disampaikan ke BBVet Wates dilengkapi dengan Form 1, 2, 3 rekap form 1,2,3, Kwitansi, Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR), dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.

## **BAB VIII. MANAJEMEN OPERASIONAL**

### **A. Manajemen SDM Pelaksana Kegiatan.**

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi di Balai Besar Veteriner Wates terdiri dari :

1. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai penanggung jawab Program Penanggulangan Gangguan Reproduksi.
2. Tenaga teknis dan administrasi BBVet Wates, rincian tugas sebagai berikut :
  - a. Menyiapkan Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2017;
  - b. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten dan Propinsi;
  - c. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan bersama dengan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
  - d. Melaksanakan identifikasi dan inventarisasi serta pengelolaan sarana dan prasarana pendukung yang tersedia;
  - e. Melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut diatas; dan
  - f. Melaporkan kinerja pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktorat Budidaya Ternak dan Direktorat Kesehatan Hewan.

### **B. Tim Pendamping**

Untuk tim pendamping Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan ketersediaan Sumber Daya Manusia dan sumber pendanaannya untuk melaksanakan peran dan tugas antara lain:

- a. *Refresher/Coaching* internal SDM Perguruan Tinggi berkaitan dengan pendampingan penanggulangan Gangguan Reproduksi;
- b. Operasional penanganan/terapi kasus gangguan reproduksi jika diperlukan;
- c. Evaluasi keberhasilan kegiatan dalam bentuk kajian pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi jika diperlukan.

### **C. Tim Teknis Kabupaten/Kota**

Tim Teknis Kabupaten/Kota terdiri dari unsur-unsur Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan kabupaten/kota dan petugas teknis Pusat Kesehatan Hewan (Medik Reproduksi, Inseminator, PKB, IB, ATR, paramedik reproduksi dan rekorder) sebagai pelaksana tingkat lapang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten.

Tim teknis penanggulangan gangguan reproduksi kabupaten melibatkan secara aktif petugas teknis lapangan, Tim teknis kabupaten/ kota sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Penanggulangan Gangrep Kabupaten
2. Koordinator Penanggulangan Gangrep Kabupaten
3. Data Collector
4. Petugas SPJ Dinas
5. Tim Operasioal lapangan

Keterangan :

1. Penanggung jawab Penanggulangan Gangrep Kabupaten adalah Kepala Dinas yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten/ Kota. Tugas Penanggung jawab Penanggulangan Gangrep adalah sebagai penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangrep kabupaten/ kota secara keseluruhan;
2. Koordinator Penanggulangan Gangrep Kabupaten adalah Kepala Bidang atau Kepala Seksi yang mengkoordinir Kegiatan Penanggulangan Gangrep di Kabupaten/ Kota yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Koordinator bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Gangrep Kabupaten/ Kota secara keseluruhan;
3. Tim Operasional lapangan adalah Tim yang melaksanakan kegiatan Penanggulangan Gangrep di lapangan; satu tim sedapat mungkin terdiri dari 5 orang dan diharapkan memiliki komposisi sebagai berikut: Dokter Hewan, ATR, PKB/ Inseminator dan recorder. Setiap kabupaten/ kota dapat membentuk tim yang jumlahnya lebih dari satu, disesuaikan dengan ketersediaan SDM dan target akseptor, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya target akseptor. Tim lapangan bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi mengacu pada petunjuk pelaksanaan kegiatan, melakukan pemantauan terhadap hasil penanggulangan gangguan reproduksi, menyusun

dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Koordinator Kabupaten/ Kota;

4. Colector data adalah tim yang bertugas untuk menginput data hasil penanggulangan gangrep ke iSIKHNAS dan aplikasi database yang disiapkan oleh BBVet Wates. Tim ini terdiri dari 2 orang, diharapkan dilaksanakan oleh koordinator iSIKHNAS Kabupaten/ Kota.
5. Petugas SPJ bertugas untuk meng-SPJ-kan rampung hasil kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi Kabupaten/ kota dan menyerahkan ke BBVet Wates Yogyakarta.

Fasilitas terhadap Tim Teknis penanggulangan gangguan reproduksi tingkat Kabupaten:

1. Perjalanan koordinasi ke tingkat Kecamatan/ Desa selama kegiatan berlangsung dalam rangka pemetaan dan pendataan jumlah akseptor, koordinasi kegiatan penanggulangan dan kegiatan lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penanggulangan gangguan reproduksi dan pemantauan hasil penanganan gangguan reproduksi, dengan jumlah yang terbatas disesuaikan dengan keperluan.
2. Perjalanan ke BBVet Wates untuk peng-SPJ-an hasil kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi.
3. Perjalanan dinas untuk pendamping desa yang aktif membantu pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi.
4. Honor untuk penanggung jawab kegiatan, koordinator tim teknis, data collector dan honor untuk penanggungjawab SPJ.
5. Dana pembuatan laporan akhir kegiatan.

#### **D. Manajemen Keuangan**

Pembayaran jasa dan operasional kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi dilakukan oleh BBVet kepada rekanan atau petugas sesuai:

1. Pembayaran terhadap rekanan pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan kontrak /perjanjian.
2. Honor pelaksana kegiatan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sesuai dengan yang telah ditetapkan.
3. Perjalanan petugas BBVet Wates ke lapangan dalam rangka melaksanakan tugas penanggulangan gangrep dibayarkan uang lumsum per orang/hari besarnya

sesuai dengan besarnya Standar Biaya Umum (SBU) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 53 tahun 2014.

4. Honor tenaga ahli dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan jumlah perjalanan dinasnya terkait penanggulangan gangguan reproduksi dengan besaran nilai sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Biaya operasional penanggulangan gangguan reproduksi dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - a. Pembayaran pertama setelah menemukan akseptor dan menangani masalah gangguan reproduksi sesuai dengan diagnosis dan penanganannya/ pengobatannya terhadap petugas dibayarkan biaya operasional sejumlah Rp.60.000,- per akseptor
  - b. Apabila dalam tindakan memerlukan pengobatan lanjutan maka Petugas/Tim wajib melaksanakan pengobatan lanjutan sambil melakukan pemantauan hasil pengobatan.
  - c. Pengobatan II dan Pemantauan I dilakukan pada kurang lebih 30 hari setelah pengobatan pertama dan dilaporkan dalam form 2. Ternak dinyatakan sembuh apabila terjadi respon perbaikan kondisi fisik tubuh secara umum maupun pada organ reproduksi ditandai dengan munculnya folikel aktif dan kembalinya siklus estrus. Untuk kegiatan Pengobatan II terhadap ternak yang belum sembuh dari gangguan reproduksi dan Pemantauan I dibayarkan Rp 40.000,-,
  - d. Sapi akseptor gangrep yang telah sembuh dan estrus diharapkan dapat di IB dengan IB program UPSUS SIWAB. Ternak majir disarankan untuk dikeluarkan dari akseptor gangrep dengan dibuatkan SKSR yang ditanda tangani oleh Dokter Hewan dalam tim.
  - e. Kegiatan ketiga adalah Pemantauan II, kegiatan ini untuk memantau kesembuhan/ kebuntingan/ kelahiran dari akseptor yang telah di obati/ di inseminasi buatan. Pada Pemantauan II ini akan dibayarkan Rp. 10.000,- per akseptor.
  - f. Pembayaran biaya operasional dilakukan setelah kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi di-SPJ-kan lengkap dan dikirim ke BBVet Wates.
  - g. Pembayaran biaya operasional dapat dilakukan dengan mekanisme:
    1. Pembayaran langsung oleh Bendahara BBVet Wates kepada Koordinator/ Perwakilan yang meng-SPJ-kan ke BBVet.

2. Pembayaran melalui transfer ke rekening Koordinator/ Anggota tim yang disepakati dari Dinas Kabupaten setelah SPJ rampung.

Tabel 3. Jadwal pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi

KETERANGAN	Bulan TAHUN 2017											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Persiapan 1	■	■	■									
Rapat – Rapat Koordinasi		■	■									
Pelaksanaan Penanggulangan Gangrep			■	■	■	■	■	■				
Pengobatan II Pemantauan I				■	■	■	■	■	■			
Pemantauan II									■	■	■	
Peng SPJ an Kegiatan				■	■	■	■	■	■	■	■	
Monitoring evaluasi			■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Pelaporan											■	■

## **IX. PENUTUP**

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada ternak sapi/kerbau tahun 2017 ini disusun untuk dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi pada ternak sapi/kerbau khususnya di wilayah target kerja Balai Besar Veteriner Wates (Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta).

Untuk keberhasilan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi tersebut diperlukan kerja sama yang baik antara Balai Besar Veteriner Wates, Unit Pelaksana Teknis Pusat, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Perguruan Tinggi serta Dinas-Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan tersebut, disamping itu diperlukan juga kerja sama yang baik dengan para peternak, pengelola kelompok peternak dan petugas-petugas teknis lapangan yang menangani pelaksanaan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi pada ternak sapi/kerbau.

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis ini diharapkan kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/kerbau di wilayah kerja BBVet Wates dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan hasil yang optimal.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Target Akseptor Gangrep Propinsi Jawa Timur

NO	KABUPATEN	TARGET PENANGGULANG AN GANGREP	TARGET PEMANTAUAN II
1	BANGKALAN	4.520	2.712
2	BANYUWANGI	3.000	1.800
3	BLITAR	3.880	2.328
4	BOJONEGORO	5.250	3.150
5	BONDOWOSO	5.770	3.462
6	GRESIK	1.290	774
7	JEMBER	6.500	3.900
8	JOMBANG	4.140	2.484
9	KEDIRI	4.750	2.850
10	KOTA BATU	500	300
11	KOTA BLITAR	130	78
12	KOTA KEDIRI	130	78
13	KOTA MALANG	130	78
14	KT. PROBOLINGGO	300	180
15	LAMONGAN	3.320	1.992
16	LUMAJANG	6.240	3.744
17	MADIUN	2.300	1.380
18	MAGETAN	3.880	2.328
19	MALANG	5.060	3.036
20	MOJOKERTO	2.590	1.554
21	NGANJUK	3.470	2.082
22	NGAWI	3.020	1.812
23	PACITAN	2.330	1.398
24	PAMEKASAN	4.600	2.760
25	PASURUAN	2.160	1.296
26	PONOROGO	2.690	1.614
27	PROBOLINGGO	5.180	3.108
28	SAMPANG	4.800	2.880
29	SIDOARJO	600	360
30	SITUBONDO	5.000	3.000
31	SUMENEP	3.050	1.830
32	TRENGGALEK	4.110	2.466
33	TUBAN	7.230	4.338
34	TULUNGAGUNG	2.590	.554
	<b>JUMLAH</b>	<b>114.510</b>	<b>68.706</b>

## Lampiran 2. Target Akseptor Gangrep Propinsi Jawa Tengah

NO	KABUPATEN	TARGET PENANGGULANGAN GANGREP	TARGET PEMANTAUAN II
1	BANJARNEGARA	900	540
2	BANYUMAS	600	360
3	BATANG	790	474
4	BLORA	4.100	2.460
5	BOYOLALI	3.750	2.250
6	BREBES	1.460	876
7	CILACAP	630	378
8	DEMAK	120	72
9	GROBOGAN	3.160	1.896
10	JEPARA	700	420
11	KARANGANYAR	2.080	1.248
12	KEBUMEN	2.490	1.494
13	KENDAL	790	474
14	KLATEN	2.470	1.482
15	KUDUS	100	60
16	MAGELANG	2.100	1.260
17	PATI	1.950	1.170
18	PEKALONGAN	80	48
19	PEMALANG	390	234
20	PURBALINGGA	590	354
21	PURWOREJO	590	354
22	REMBANG	4.650	2.790
23	SALATIGA	200	120
24	SEMARANG	2.180	1.308
25	SRAGEN	2.670	1.602
26	SUKOHARJO	790	474
27	TEGAL	330	198
28	TEMANGGUNG	650	390
29	WONOGIRI	4.800	2.880
30	WONOSOBO	590	354
31	Kt SEMARANG	310	186
	<b>JUMLAH</b>	<b>47.010</b>	<b>28.206</b>

### Lampiran 3. Target Akseptor Gangrep Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	KABUPATEN	TARGET PENANGGULANGAN GANGREP	TARGET PEMANTAUAN II
1	BANTUL	1.526	916
2	GUNUNG KIDUL	2.930	1.758
3	KT. YOGYAKARTA	0	0
4	KULON PROGO	1.000	600
5	SLEMAN	700	420
	JUMLAH	6.156	3.694

Lampiran 4. Surat Keterangan Status Reproduksi

SKSR ke.....(1,2,3 dst..)

# KOP SURAT

## Surat Keterangan Status Reproduksi

Nomor SKSR : nomor kode kab/kota+kec-no urut sksr

Yang bertandatangan dibawah ini .....menerangkan bahwa pada hari....., tanggal....., bulan....., tahun.....telah memeriksa hewan dibawah ini :

Nomor Kartu Tenak	.....
No ID Hewan	.....
Nama Pemilik	.....
Nomor ID Pemilik	.....
Alamat pemilik	.....

Menerangkan bahwa hewan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan, dinyatakan status reproduksinya \*)

1. BCS < 2,0  .....(diisi sesuai hasil pemeriksaan)
2. BCS ≥ 2,0 
  - a. Bunting
  - b. Normal dan Tidak Bunting
  - c. Tidak Normal/Tidak Produktif Infausta
  - d. Tidak Normal/Tidak Produktif Fausta   
hypofungsi\*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui,  
Dokter Hewan Penyelia,

( )

\*)

\* untuk kasus hypofungsi direkap per kab/kota untuk dijadikan sebagai dasar pemberian pakan konsentrat

Kecamatan ...../...../2017
Tanda tangan Pemeriksa
nama

- SKSR dibuat rangkap 4  
 Lembar 1 untuk UPT Veteriner / Dinas Provinsi  
 Lembar 2 untuk Dinas Kabupaten/ Kota  
 Lembar 3 untuk Dokter Hewan Puskesmas  
 Lembar 4 untuk peternak

# Lampiran 5. Form 1 Pengobatan I Penanggulangan Gangrep

FORM 1

BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA  
 Jalan Raya Wates-Wates Km 27, Tromol Pos 18 Wates 55602, Telp. (0274) 773168 Fax. (0274)773334  
 Website : www.bbvewates.ditjenhik.pertanian.go.id.

## FORM PEGOBATAN I PEANGGULANGAN GANGGGUAN REPRODUKSI

PETUGAS/ KETUA TIM : KECAMATAN : TANGGAL :  
 PROPINSI : DESA : NAMA KELOMPOK TERNAK :  
 KABUPATEN : DUSUN :

NO	IDENTITAS PEMILIK			IDENTITAS TERNAK				PENANGANAN GANGREP					ADVIS	PARAF PEMILIK
	NAMA PETERNAK	ID PETERNAK NO HP/KTP	ALAMAT RT/RW/LL/Desa	ID TERNAK	JENIS/SKEED TERNAK	SCS/NKT	UMUR	GEJALA GANGREP	TGL IS TERAKHIR	*DIAGNOSA	*PROGNOSA	* TERAPI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

KODE PENSIAN (SESUAI SIKHNAS)

JENIS/ BREED TERNAK  
 SPPD = Sapi PD  
 SPMa = Sapi Madura  
 SPSa = Sapi Sali  
 SPU = Sapi Limosin  
 SPSR = Sapi Srahman  
 SPSi = Sapi Simental  
 SPPH = Sapi PH

GEJALA GANGREP

KBR = Kawan Boulang  
 KO = Kogunen/Abortus  
 PR = Prolepus uteri  
 BRT = Sireh/ Torang/ silent heat  
 RP = Rotasi Placenta  
 AAS = Anestus

DIAGNOSA

HFO = Hypofungsi Ovarium  
 CLP = Corpus Luteum Persisten  
 SOM = Endometriosis  
 PFD = Piodidra  
 CSO = Ovarial Cyst  
 SHT = Silent heat

PROGNOSA

1. Fausa  
 2. Infusida  
 3. Dubius  
 4. Fausa  
 5. Infusida  
 6. Dubius

TERAPI

CS0 = Mucicide Bolus  
 P60 = COPAVIT 500  
 S105 = Bisdin  
 P105 = Homadopen S12  
 S1 = Vitadryl inj.  
 P124 = Legator P1 Premix  
 N6 = Junemat  
 N19 = Fortagyl  
 S445 = Motricum  
 I22 = Ousanol spray  
 N121 = Povidon Iodine  
 S556 = Pen & Stop

ADVIS

1. Dapoksa Ulang  
 2. Tunggu Sirahi  
 3. Perhatikan Nutrisi  
 4. Kukur Program

Mengalahkan, Koordinator Kabupaten

Mengalahkan, Kepala Desa

Petugas/Ketua Tim

( )

( )

( )

## Lampiran 6. Form 2 Pengobatan II dan Pemantauan I Penanggulangan Gangrep

BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA  
 Jalan Raya Yogya-Wates Km 27, Tromol Pos 18 Wates 35602, Telp. (0274) 773168 Fax. (0274)773334  
 Website : www.bbvetwates.ditjenhik.pertanian.go.id.

FORM 2

### FORM PENGOBATAN II DAN PEMANTAUAN I PENAGGULANGAN GANGREP

PETUGAS/KETUA TIM : \_\_\_\_\_ KECAMATAN : \_\_\_\_\_  
 PROPINSI : \_\_\_\_\_ DESA : \_\_\_\_\_  
 KABUPATEN : \_\_\_\_\_ DUKUN : \_\_\_\_\_

NO	IDENTITAS PEMILIK			IDENTITAS TERNAK		HASIL PEMANTAUAN			TDL IS/KAWIN ALAM	KETERANGAN	TANDA TANGAN PETERNAK
	NAMA PETERNAK	ID PETERNAK NO HP/KTP	ALAMAT : RT/ RT/ GANG/ JLN	ID TERNAK	UMUR	KESEMBUHAN		TERAPI LANJUTAN			
						SEMBUH	TOK SEMBUH				
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Catatan : - Beri tanda "✓" pada kolom sembuh  
 - Isi nomor pengobatan sesuai list terapi, jika ada terapi lanjutan  
 - Beri tanda "x" jika tidak sembuh

#### TERAPI

C80 = Flukloksasilin  
 F60 = COXAVIT 500  
 F102 = Modin  
 F288 = Hama Topan 812  
 S1 = Vetadrylinj  
 F124 = Lagantor F1 Premix  
 N5 = Juramata  
 N19 = Fertagyl  
 0445 = Mentrone  
 I22 = Gusanek spray  
 M121 = Povidon Iodine  
 0205 = Pen & Strip

Mengetahui, Koordinator Kabupaten

Mengetahui, Kepala Desa

Petugas/Ketua tim

( )

( )

( )

# Lampiran 7. Form 3 Pemantauan II Penanggulangan Gangrep

**BALAI BESAR VETERINER WATES YOGYAKARTA**  
 Jalan Raya Yogya-Wates Km 27, Tromol Pos 18 Wates 55602, Telp. (0274) 773168 Fax. (0274)773354  
 Website : www.bbvetwates.ditjennek.pertanian.go.id.

FORM 3

## FORM PEMANTAUAN II PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI

PETUGAS/KETUA TIM :  
 PROPINSI :  
 KABUPATEN :  
 KECAMATAN :  
 DESA :  
 DUSUN :

NO	IDENTITAS PEMILIK			IDENTITAS TERNAK		HASIL PEMANTAUAN III				TANDA TANGAN PETERNAK	
	NAMA PETERNAK	ID PETERNAK NO HP/KTP	ALAMAT : RT/ RT/ GANG/ JLN	ID TERNAK	UMUR	KESEMBUHAN		HASIL PKB			JUMLAH MELAHIRKAN
						SEMBUH	TDK SEMBUH	BUNTING (UMUR KEBUNTINGAN)	TIDAK BUNTING		
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Catatan : - Beri tanda "√" pada kolom sembuh jika sembuh  
 - Beri tanda "x" pada kolom tidak sembuh, jika tidak sembuh

Mengetahui, Koordinator Kabupaten

Mengetahui, Kepala Desa

Petugas/Ketua tim

( )

( )

( )





